

LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2022





LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Penerapan Tata Kelola
PERUMDA BPR BANK PASAR KABUPATEN TEMANGGUNG Tahun 2022**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 4 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PERUMDA BPR BANK PASAR KABUPATEN TEMANGGUNG selama tahun 2022. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Temanggung, 25 Januari 2023

PERUMDA BPR BANK PASAR KABUPATEN TEMANGGUNG

Disiapkan oleh

TUTIK WAGIYARTI, SE

Kepala Bagian Umum, PEMR, Kepatuhan dan
Manajemen Risiko

Disetujui oleh



RETNO NENDRA WIARTY, SE, MM

Direktur Utama YMKF

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PERUMDA BPR BANK PASAR KABUPATEN
TEMANGGUNG
TAHUN 2022**



**Jl. Letjend Suprpto No. 32 Temanggung
TELEPON: 0293491814**

BAB I

PENJELASAN UMUM

Semester kedua tahun 2022 ini, Perumda BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan skala usaha yang dibarengi dengan makin tingginya persaingan dan makin meningkatnya risiko bisnis yang BPR. untuk itu Perumda BPR Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk berusaha meningkatkan penerapan Tata Kelola perusahaan yang baik agar mampu bertahan dan menghadapi tantangan dan pengaruh kondisi ekonomi tahun 2023 yang diprediksi semakin berat.

Perumda BPR Bank Pasar Temanggung berusaha secara konsisten menjaga integritas seluruh jajaran organisasi untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik, yaitu Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Akuntability), Tanggung Jawab (Responsibility), Independensi (Independency) dan Kewajaran (Fairness) dalam seluruh aktivitas usaha BPR

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dasar Tata Kelola yang baik diharapkan BPR dapat terus mempertahankan bisnis secara sehat dan kompetitif, sekaligus sebagai upaya menjaga kepercayaan stakeholders.

Dalam hal masih terdapat penerapan yang belum maksimal, Perumda BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung berupaya terus memperbaiki penerapannya secara bertahap dan konsisten.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	RETNO NENDRA WIARTY
	Jabatan	:	Direktur Utama yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR; 2. mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai peraturan dan berdasar prinsip kehati-hatian 3. memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap peraturan perundang-undangan dan seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan/ atau otoritas terkait lainnya 4. merealisasikan Rencana Kerja dan anggaran dasar Bank, serta 5. melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola pada seluruh jenjang organisasi 6. memastikan terlaksananya sosialisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang berkelanjutan 7. mengembangkan budaya kepatuhan dan manajemen risiko kepada seluruh jenjang organisasi		
2.	Nama	:	ESTI WIBOWO
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1. Bersama dengan Direktur Utama bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian sesuai tanggung jawab dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. 2. Bertanggung jawab atas kegiatan operasional Bank, baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana kepada masyarakat; 3. Bertanggung jawab atas pengaduan, penanganan, dan penyelesaian keluhan/ pengaduan nasabah; dan 4. memantau perkembangan kondisi internal dan eksternal perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi strategi usaha Bank.		
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :			
Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris terkait penanganan pelaksanaan gaji bruto ASN, melakukan komunikasi perihal pelaksanaan gaji tenaga PPPK Pemkab dengan pihak terkait, penanganan dan penyelesaian fraud, meningkatkan proporsi penyaluran dana kepada kredit UMKM, merealisasikan pemindahan kantor kas Wonoboyo dan Candirotro ke kompleks kantor kecamatan, memantau tingkat kesehatan BPR; melaksanakan pemantauan dan pelatihan penerapan APU PPT; dan memastikan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.			
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Nihil			

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	KRISTRI WIDODO
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1. Komisaris atau Ketua Dewan Pengawas memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan organisasi,		
	2. melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi		
2.	3. mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR		
	4. memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi pejabat audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK maupun otoritas lainnya		
	5. melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris; dan		
	6. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal		
	Nama	:	IWAN SISWANTO
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Bersama dengan Komisaris Utama atau Ketua Dewan Pengawas memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan organisasi, melakukan pengawasan, arahan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal		
Rekomendasi Kepada Direksi :			
1 Persetujuan atas Rencana Bisnis BPR,			
2 persetujuan dan pertimbangan rotasi, mutasi dan kebijakan terkait kepegawaian			
3 memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian fraud dan pengawasan terhadap pelaksanaan APU PPT			
4 memberikan evaluasi dan persetujuan pengkinian kebijakan Bank			
5 memberikan saran dan masukan untuk menambah porsi penyaluran kredit ke kredit UMKM untuk mengantisipasi penurunan kredit pegawai akibat pemberlakuan kebijakan gaji bruto			
6 memberikan nasehat atau pertimbangan terkait pelaksanaan penyaluran gaji ASN, PPPK dan kegiatan penyaluran dana alokasi desa			
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Nihil			

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada

2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
BPR tidak memiliki Komite karena modal inti masih dibawah Rp 80 milyar	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	BPR belum memiliki komite karena modal inti belum belum mencapai Rp.80 milyar	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
BPR belum memiliki komite karena modal inti belum mencapai Rp 80 milyar			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	RETNO NENDRA WIARTY	Rp0,00	0%
2.	ESTI WIBOWO	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Direksi tidak memiliki saham pada BPR			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	RETNO NENDRA WIARTY	-	-	0%
2.	ESTI WIBOWO	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	RETNO NENDRA WIARTY	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	ESTI WIBOWO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain pada BPR				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga
-----	--------------	-------------------

		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	RETNO NENDRA WIARTY	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	ESTI WIBOWO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain pada BPR				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	KRISTRI WIDODO	Rp0,00	0%
2.	IWAN SISWANTO	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada BPR			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	KRISTRI WIDODO	-	-	0%
2.	IWAN SISWANTO	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada perusahaan lain				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	KRISTRI WIDODO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	IWAN SISWANTO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi, anggota dewan komisaris maupun dengan pemegang saham				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	KRISTRI WIDODO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	IWAN SISWANTO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
anggota Dewan komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota dewan Komisaris , maupun dengan Pemegang Saham				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp1.312.574.530,00	2	Rp393.772.359,00
2.	Tunjangan	2	Rp1.351.584.776,00	2	Rp294.679.444,00
3.	Tantiem	2	Rp268.704.329,00	2	Rp80.611.298,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	2	Rp0,00	0	Rp0,00
Total			Rp2.932.863.635,00		Rp769.063.101,00
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Remunerasi lainnya merupakan penerimaan lainnya berupa bonus, insentif dan tunjangan hari raya					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	kendaraan (2)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Ketenagakerjaan (2), BPJS Kesehatan (2)	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
fasilitas perumahan dan asuransi kesehatan diberikan dalam bentuk tunjangan/ remunerasi yng diterimakan bersama dengan gaji			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	23 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.25 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.25 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3.33 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	4 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Gaji dimaksud merupakan gaji pokok dan tunjangan yang diterima selama 1 tahun, tidak termasuk penerimaan lain	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	25 Januari 2022	8	Rapat Pembahasan mutasi karyawan
2.	23 Februari 2022	10	Sosialisasi Rencana Bisnis Bank 2022
3.	07 Maret 2022	8	Pembahasan Koreksi Rencana Bisnis Bank 2022
4.	30 Mei 2022	10	Rapat Evaluasi Tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK serta mempersiapkan pelayanan tenaga P3K yang akan di kelola Perumda BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung
5.	15 Juni 2022	8	Pembahasan Rencana Bisnis Bank Perubahan tahun 2022
6.	27 Juni 2022	10	Pembahasan Penyaluran Gaji P3K
7.	01 Juli 2022	8	Pembahasan penghapusan kebijakan pengenaan denda atas keterlambatan angsuran bagi nasabah
8.	22 Juli 2022	8	pembahasan mengenai MOU dengan Dindikpora yg berkaitan dengan rekening gaji P3K
9.	28 Juli 2022	13	Monitoring Kinerja Triwulan 2
10.	10 Agustus 2022	8	Pembahasan mengenai Pinjaman/Kredit untuk P3K
11.	26 Agustus 2022	10	Pembahasan mengenai Tindak Lanjut Pemeriksaan OJK Tahun 2021
12.	16 September 2022	15	Pembahasan pinjaman dengan agunan Los/Kios

			Pasar tidak dapat di jadikan jaminan Pinjaman
13.	20 Oktober 2022	9	Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan OJK dan Penyesuaian Kolektibilitas Kredit Restruk
14.	29 November 2022	10	Evaluasi kinerja menghadapi akhir Tahun 2022
15.	22 Desember 2022	12	Pembahasan Audit TI ATM
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Materi rapat Dewan Komisaris tahun 2021 didominasi evaluasi kinerja BPR berkaitan dengan kondisi pandemi yang masih berlangsung, dan rapat pembahasan gaji bruto untuk ASN yang mengakibatkan BPR mengalami kendala pemotongan angsuran kredit pegawai ASN			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	KRISTRI WIDODO	5	0	100%
2.	IWAN SISWANTO	4	0	80%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Ketua Dewan Komisaris menghadiri keseluruhan rapat Dewan Komisaris, sedangkan Anggota Dewan Pengawas menghadiri 80% rapat				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	1	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		1		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
tidak terjadi penyimpangan internal								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
tidak terdapat permasalahan hukum baik dalam proses penyelesaian maupun berkekuatan hukum tetap yang dihadapi BPR selama periode laporan		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	01 Januari 2022	Sosial	Pembelian Piala pertandingan	Asosiasi PSSI Kabupaten Temanggung	Rp5.000.000,00
2.	16 Maret 2022	Sosial	pembelian kelengkapan kegiatan Vaksin	Bantuan Giat Percepatan Vaksin Covid 19 puskesmas se Kab Temanggung	Rp5.000.000,00
3.	27 April 2022	Sosial	pembagian sembako kepada beberapa tukang becak yang ada di lingkungan sekitar kantor pusat dan kantor kas	Bantuan Tukang Becak	Rp7.000.000,00

4.	22 Juli 2022	Sosial	Bantuan kaos di berikan kepada peserta paskibraka yang bertugas di alun-alun kabupaten Temanggung untuk HUT RI tanggal 17 Agustus 2022	Bantuan Paskibraka	Rp6.375.000,00
5.	01 Agustus 2022	Sosial	pembelian piala dan kaos untuk peserta PKK kecamatan Kledung kabupaten Temanggung	PKK Kecamatan Kledung	Rp4.800.000,00
6.	13 September 2022	Sosial	Bantuan material untuk kegiatan pembangunan TPQ Desa Wonokerso kabupaten Temanggung	TPQ DESA WONOKERSO	Rp5.000.000,00
7.	06 Oktober 2022	Sosial	Bantuan korban kebakaran pabrik tahu	Pemilik Pabrik Tahu	Rp5.000.000,00
8.	27 Oktober 2022	Sosial	Bantuan kegiatan edukasi literasi ke peserta didik SMP I Tlogomulyo	SMP 1 TLOGOMULYO	Rp10.199.000,00
9.	10 November 2022	Sosial	progam layanan khusus perangkat desa dalam rangka Hut Kabupaten Temanggung di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung	SKPD Kabupaten Temanggung	Rp7.856.400,00
10.	10 November 2022	Sosial	Pembagian sembako kepada pekerja buruh di lingkungan kantor Pusat dan Kantor Kas perumda BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung	Pekerja Buruh Harian Lepas	Rp27.548.500,00
11.	14 November 2022	Sosial	Mujahadah Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Jadi Kaupaten Temanggung ke 188 Tahun 2022	Pemerintah Kabupaten Temanggung	Rp16.300.000,00
12.	07 Desember 2022	Sosial	Bantuan Logistik untuk Korban Bencana Alam di Cianjur	Masyarakat Cianjur	Rp2.500.000,00

Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik
Pemberian dana BPR untuk kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi & pengembangan UMKM diberikan melalui dana CSR Bank, dan BPR tidak pernah memberikan dana untuk kegiatan politik

BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PERUMDA BPR BANK PASAR KABUPATEN TEMANGGUNG
 Alamat : Jl. Letjend Suprpto No. 32 Temanggung
 Nomor Telepon : 0293491814
 Posisi Laporan : Desember 2022
 Modal Inti : Rp51.542.367.494,00
 Total Aset : Rp497.590.692.340,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PERUMDA BPR BANK PASAR KABUPATEN TEMANGGUNG Tahun 2022, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 2.2 dengan predikat Baik (2)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2.01	0.402
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.05	0.308
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.10	0.210
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.35	0.235
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.30	0.230
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.00	0.050
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.67	0.267
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.90	0.143
10	Rencana Bisnis BPR	2.17	0.163
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.05	0.154
Nilai Komposit			2.200
Predikat Komposit			Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 2.01)

Dengan kenaikan jumlah modal inti BPR pada semester kedua tahun 2022 ini, jumlah Direksi BPR sesuai ketentuan menjadi 3 (tiga) orang, dan sampai dengan bulan laporan, jumlah Direksi BPR masih 2 (dua) orang dengan salah satu Direktur sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Ketentuan jumlah Direksi BPR yang baru ini belum dapat dipenuhi BPR karena pemenuhan Direksi masih harus melalui proses pengajuan dan persetujuan dari pemilik yaitu Bupati dan Otoritas Jasa Keuangan.

Direksi BPR tidak memiliki hubungan dengan sesama Direksi atau Dewan Komisaris, keduanya berdomisili di kota yang sama dengan domisili kantor pusat BPR, telah lulus uji kemampuan dan kepatutan serta telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai ketentuan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.05)

Sejalan dengan perubahan ketentuan jumlah Direksi akibat kenaikan modal inti BPR pada semester kedua tahun 2022 ini, jumlah anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan menjadi 3 (tiga) orang. Namun pemenuhan jumlah Dewan Pengawas belum dapat dilaksanakan karena harus melalui proses pengajuan dan persetujuan kepada pemilik (Bupati) dan Otoritas Jasa keuangan.

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan, tidak memiliki hubungan dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun dengan Direksi, dan telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam pengawasan BPR dengan cukup baik

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

BPR belum berkewajiban memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko karena modal inti BPR pada semester kedua tahun 2022 ini belum mencapai Rp 80 milyar.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2.1)

BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelesaian Benturan Kepentingan namun masih perlu disempurnakan, dan tidak terdapat transaksi di BPR yang mengandung benturan kepentingan

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.35)

Direktur Utama yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani kegiatan operasional, telah memastikan BPR sudah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dan penyampaian laporan kepada OJK dan otoritas lainnya. Pejabat Eksekutif telah melakukan penyempurnaan dan pengkinian kebijakan dan prosedur namun belum maksimal. Untuk pelaksanaan tugas kepatuhan, BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.3)

BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. BPR telah menerapkan

fungsi audit intern sesuai ketentuan pedoman audit intern pada seluruh aspek yang secara langsung mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat. Pejabat Eksekutif Audit Intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Pengawas dan Laporan pokok-pokok hasil audit itern kepada OJK sesuai ketentuan.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2)

BPR telah melaksanakan penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik dan komunikasi antara KAP dengan OJK. KAP yang ditunjuk oleh BPR telah terdaftar di OJK serta telah memperoleh persetujuan RUPS (KPM) berdasarkan usulan ewan Pengawas/ komisaris. Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan kepada BPR secara tepat waktu, dan telah disampaikan oleh BPR kepada OJK.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.67)

BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko, namun sesuai dengan skala BPR yang semakin besar, BPR harus memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko. BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko namun masih perlu dievaluasi dan dikinikan serta dilengkapi dengan ketentuan tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada aktivitas baru sesuai ketentuan. BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan menerapkan manajemen risiko terhadap seluruh risiko yang diwajibkan OJK.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.9)

BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis terkait BMPK dan telah memenuhi ketentuan OJK tentang BMPK dan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit, serta tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan BMPK pada periode laporan.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2.17)

BPR telah menyusun rencana bisnis sesuai visi dan misi BPR yang menggambarkan rencana strategis BPR dan rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan OJK, dan telah disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.05)

BPR telah menyusun an menyajikan laporan keuangan publikasi, laporan tahunan dan laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan dengan tata cara, jenis, cakupan dan materi sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK. Laporan publikasn dan laporan tahunan telah ditandatangani oleh paling seedikit 1 orang anggota Direksi dengan nama jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK dan dipublikasikan sesuai ketentuan OJK

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan analisis atas seluruh kriteria Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR tersebut, BPR telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik, senantiasa mendorong budaya kepatuhan dan

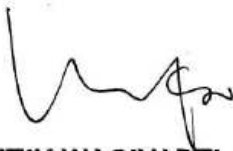
peningkatan kesadaran risiko. Dalam hal terdapat kelemahan terkait pemenuhan struktur organisasi, hal ini disebabkan karena BPR baru mengalami peningkatan modal inti menjadi diatas Rp. 50 milyar pada semester ini, sedangkan pemenuhan struktur organisasi BPR dalam hal ini Direksi dan Dewan Pengawas, harus atas persetujuan pemilik yaitu Bupati yang sampai saat ini belum terpenuhi. Namun demikian, BPR telah memenuhi sebagian besar ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara cukup memadai.

Struktur Tata Kelola BPR cukup memadai, proses pada sebagian besar faktor cukup efektif dan hasil penerapan tata kelola dari keseluruhan faktor sudah cukup baik. Namun demikian masih terdapat faktor-faktor penerapan tata kelola yang perlu mendapat perhatian untuk diperbaiki dimasa yang akan datang.

Temanggung, 25 Januari 2023

PERUMDA BPR BANK PASAR KABUPATEN TEMANGGUNG

Disiapkan oleh



TUTIK WAGIYARTI, SE

Kepala Bagian Umum, PEMR, Kepatuhan dan
Manajemen Risiko

Disetujui oleh



RETNO NENDRA WIARTY, SE, MM
Direktur Utama YMFK

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

Perumda BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

505608-1-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-600555-
27012023141855

Periode Data

2022

User ID Petugas Pelaporan

bankpasar_tmg_2007@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-01-27 14:18:55



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.